

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Good corporate governance yaitu sistem tata kelola yang dimaksudkan untuk mengarahkan manajemen bisnis yang profesional dengan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, tanggungjawab, independensi dan keadilan (Effendi, 2016). Faktor penting yang menjadi fasilitator keberhasilan suatu entitas dan menjadi sumber permasalahan utama perusahaan adalah *corporate governance*. Salah satu penyebab kegagalan perusahaan besar seperti Enron, Sears, Payless dan Monarch Airlines adalah karena tidak menerapkan *good corporate governance*. Selama krisis ekonomi 1997-1998, banyak perusahaan di Indonesia yang runtuh karena kinerja keuangannya terganggu. Hal ini disebabkan akibat tidak adanya tata kelola yang efektif.

Masalah tata kelola perusahaan juga dialami oleh BUMN Karya. BUMN Karya adalah perusahaan negara yang bergerak pada bidang konstruksi. Pada rapat komisi VI DPR RI dengan Menteri BUMN pada 5 Juni 2023, Wakil Menteri BUMN menyampaikan bahwa BUMN Karya sedang mengalami tiga masalah utama, yaitu ekosistem yang kurang sehat serta tata kelola keuangan dan manajemen yang kurang baik. Tidak hanya itu, pada tanggal 16 November 2023 BEI menghentikan kegiatan perdagangan saham salah satu BUMN Karya yaitu PT Waskita Karya (Persero) Tbk di seluruh pasar modal karena adanya penundaan pembayaran obligasi pada tahun 2019 akibat beban utang yang menumpuk. Hal tersebut menunjukkan bahwa kinerja keuangan pada perusahaan BUMN Karya juga kurang baik. Jika ini terus dibiarkan, akan berdampak negatif bagi perusahaan bahkan dapat membuat perusahaan bangkrut. Dengan demikian, dewan direksi dan dewan komisaris sebagai regulasi tertinggi dalam perusahaan memiliki peran penting dalam pengelolaan perusahaan. GCG yang diterapkan secara maksimal dapat menghasilkan data yang berguna dan andal bagi manajemen dan *stakeholders*

sehingga dapat menjadi penunjang keberhasilan bagi peningkatan performa keuangan perusahaan.

Good corporate governance terdiri dari prosedur dan sistem yang digunakan oleh perusahaan BUMN dalam peningkatan kinerja dan tanggung jawab operasional mereka, dengan tujuan menghasilkan manfaat bagi pemegang saham di masa depan (Keputusan Menteri BUMN Nomor PER2/MBU/03/2023). Hal ini dilakukan melalui pertimbangan kepentingan pihak berwenang lainnya dan berdasarkan aturan hukum dan prinsip etika. GCG yang dijalankan dengan baik, secara potensial akan berpengaruh pada performa finansial perusahaan, melindungi investor dan kreditor dari investasi yang dilakukan. Penerapannya yang efektif akan membantu bisnis menciptakan lingkungan yang memungkinkan pertumbuhan dan efisiensi secara berkelanjutan, sekaligus meyakinkan para investor (OECD, 2023). Perusahaan BUMN yang menjadi alat bagi pemerintah dalam menata kebijakan perekonomian, perlu mengaplikasikan GCG untuk meningkatkan tata kelola BUMN yang baik demi memaksimalkan kinerja yang dapat mendukung pertumbuhan perekonomian nasional. GCG merupakan sistem yang mengatur bagaimana bisnis, manajemen, karyawan, *stakeholder*, pemerintah, institusi keuangan, dan kredit berinteraksi satu sama lain (FCGI, 2017).

Indikator keberhasilan dan keberlanjutan bisnis termasuk dalam kinerja keuangan (Tunggal & Fachrurrozie, 2014). Tolak ukur yang dipakai untuk menilai tingkat keberhasilan organisasi atau entitas dalam menghasilkan keuntungan disebut sebagai kinerja keuangan. Selain itu, kinerja keuangan menjadi alat pendukung bagi manajerial dalam mengambil keputusan dan menyediakan data bagi para *stakeholders* untuk menunjukkan kredibilitas suatu perusahaan. Jika kinerja keuangan perusahaan stabil, investor akan berminat untuk menanamkan ekuitasnya. Perusahaan harus dapat mempertahankan kinerja keuangan yang stabil, yang akan terlihat dalam laporan keuangan. Kinerja keuangan suatu perusahaan dipengaruhi oleh permasalahan *corporate governance* tidak terkecuali perusahaan BUMN.

Peran dan tanggung jawab dewan komisaris serta direksi sebagai otoritas utama dalam pengelolaan perusahaan sangat penting dalam mendukung dan mendorong perkembangan kinerja keuangan perusahaan. Keberadaan mereka yang efektif dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pengambilan keputusan berkontribusi besar terhadap pencapaian hasil keuangan yang positif dan pertumbuhan perusahaan secara keseluruhan. *Corporate governance* memiliki beberapa elemen yang berdampak pada hasil keuangan. Unsur-unsur yang digunakan untuk mendistribusikan kinerja keuangan antara lain dewan direksi perusahaan, dewan komisaris, komisaris independen, komite audit, kepemilikan manajerial, dan kepemilikan institusional.

Dewan direksi merupakan faktor penting dalam penerapan *corporate governance*. Direksi adalah bagian utama sebuah perusahaan yang berwenang serta berkewajiban untuk melakukan pengelolaan operasional perusahaan. Keberhasilan *corporate governance* dan peningkatan kinerja perusahaan adalah tanggung jawab direksi secara langsung (POJK Nomor 33 Tahun 2014). Menurut Ramadhani et al., (2022), jumlah dewan direksi memengaruhi kinerja keuangan. Sedangkan menurut Initia dan Azizah (2021), jumlah dewan direksi tidak memengaruhi kinerja keuangan.

Dewan komisaris menjadi bagian selanjutnya yang berperan penting bagi mekanisme *good corporate governance*. Mengawasi dan memberi nasihat kepada direksi merupakan salah satu tanggung jawab dewan komisaris. Tugas ini dilaksanakan pada umumnya dan pada khususnya sesuai dengan anggaran dasar perseroan (POJK Nomor 33 Tahun 2014). Proses tertinggi dalam pengendalian internal perusahaan adalah dewan komisaris berdasarkan teori agensi. Dewan komisaris berperan bagi keberlangsungan hidup perusahaan. Ukuran dewan komisaris disesuaikan berdasarkan wawasan dan keterampilan yang dimiliki oleh dewan komisaris, sehingga implementasi pengawasan menjadi lebih baik. Studi yang dilakukan oleh Ramadhani dan Parasetya (2023) menyatakan bahwa kinerja keuangan dipengaruhi oleh jumlah dewan

komisaris. Sementara itu, Aprila et al., (2022) menyatakan jumlah dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan.

Karena bertugas memantau kinerja perusahaan, komisaris independen memegang peranan penting dalam struktur bisnis. Mereka memberikan kontribusi besar dengan mengawasi dan mempertimbangkan aktivitas perusahaan untuk memastikan bahwa segala sesuatunya dilakukan dengan cara melayani kepentingan terbaik perusahaan dan pemegang saham serta manajemen yang jujur dan efisien. Yang dimaksud dengan komisaris independen adalah individu dari kelompok pimpinan yang tidak bermitra dengan organisasi. Mereka diangkat secara independen melalui mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Mereka tidak memiliki afiliasi dengan pemegang saham pengendali, anggota direksi, atau anggota dewan komisaris lainnya (POJK Nomor 57 Tahun 2017). Secara prinsip, peran dan fungsi komisaris independen setara dengan yang dimiliki oleh dewan komisaris, yang berbeda hanya hubungan yang terjalin antara komisaris independen dan pemegang saham mayoritas serta arah yang diambil dewan dilarang. Komisaris yang bukan merupakan bagian dari pengurus perusahaan harus independen. Komisaris independen diharapkan bertindak sebagai pihak yang seimbang dalam pengambilan keputusan, khususnya untuk melindungi investor minoritas, atau disebut investor non-pengendali (Setiawan, 2016). Sebagian besar organisasi terbuka masih dibatasi oleh jumlah investor yang lebih besar, sehingga komisaris independen sebagai individu yang bebas memainkan peran penting dalam keadilan pasar modal, serta menciptakan lingkungan yang lebih bebas dan obyektif bagi organisasi. Menurut Handayani et al., (2023), kehadiran komisaris independen berdampak pada kinerja keuangan perusahaan. Margaret dan Daljono (2023) menyatakan bahwa jumlah komisaris independen tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan bisnis.

Dewan komisaris bertugas untuk menuntaskan masalah yang mungkin timbul antara manajer dan pemangku kepentingan. Menetapkan komite audit merupakan tanggung jawab dewan komisaris untuk meningkatkan efisiensi

dalam melaksanakan tugas dan memastikan kepatuhan. Penting bagi komite audit untuk memberikan bantuan kepada dewan komisaris dalam meninjau secara keseluruhan mengenai evaluasi laporan tahunan auditan dan laporan keuangan, evaluasi prosedur pelaporan keuangan dan pengendalian internal, dan evaluasi proses audit. Analisis peluang yang dilakukan oleh manajer bisnis dapat dipengaruhi oleh adanya persetujuan komite audit. Hal ini mendukung teori agensi dimana dewan komisaris menerima bantuan dari komite audit dari sisi pengawasan dan bertanggung jawab untuk memastikan komunikasi antar pihak yang terlibat. Semakin banyak komite audit yang ikut andil dalam pengawasan yang berhubungan dengan akuntansi dan keuangan, maka performa finansial perusahaan juga akan mengalami peningkatan. Menurut Prasetio dan Rinova (2021), terdapat pengaruh antara jumlah komite audit dengan kinerja keuangan. Namun, menurut Nurhidayanti et al., (2023) jumlah komite audit tidak memengaruhi kinerja keuangan.

Salah satu strategi paling efektif untuk menstabilkan biaya keagenan dan memungkinkan investor untuk mempertahankan pekerjaan manajerial adalah dengan meningkatkan nilai saham mereka, yaitu kepemilikan institusional dan manajerial mereka. Istilah “saham manajerial” mengacu pada dana yang dimiliki oleh entitas internal perusahaan yang berpartisipasi aktif dalam pengembangan bisnis, seperti manajer, staf pelaksana, dan pemilik bisnis (Sudarno et.al., 2022). Kepemilikan perusahaan oleh manajemen menyoroti keselarasan kepentingan antara pemangku kepentingan dan manajemen. Studi Saragih dan Sri (2021) menemukan bahwa kepemilikan manajerial berdampak pada kinerja keuangan. Sementara itu, studi empiris yang dilakukan oleh Aziizah et al., (2022) menemukan bahwa variabel kepemilikan manajerial tidak berdampak signifikan terhadap kinerja keuangan. Dengan kata lain, proporsi saham yang dimiliki oleh manajemen dalam suatu perusahaan bukanlah prediktor kuat kinerja perusahaan.

Penelitian ini juga mencakup kepemilikan institusional, atau proporsi kepemilikan yang dimiliki oleh organisasi keuangan seperti bank, perusahaan

asuransi, instansi pemerintah, dan lain-lain (Aprilia & Riharjo, 2022). Untuk meningkatkan kinerja, kepemilikan institusional dapat membantu mengurangi kepentingan yang bertentangan di dalam suatu organisasi (Pasaribu et.al., 2016). Hartati (2020) menunjukkan bahwa kinerja keuangan dipengaruhi oleh jumlah kepemilikan institusional. Sedangkan Yulianti dan Cahyonowati (2023) menyatakan bahwa kinerja keuangan perusahaan tidak dipengaruhi oleh jumlah kepemilikan institusional.

Sesuai latar belakang yang telah dijelaskan, yaitu adanya kasus terkait penerapan *good governance* pada badan usaha milik negara dan hasil penelitian sebelumnya berbeda, sehingga peneliti ingin melakukan penelitian dengan judul “PENGARUH MEKANISME *CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN (Studi Empiris pada Perusahaan BUMN yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2020-2023)”.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah kinerja keuangan dipengaruhi oleh jumlah dewan komisaris?
2. Apakah kinerja keuangan dipengaruhi oleh jumlah komisaris independen?
3. Apakah kinerja keuangan dipengaruhi oleh jumlah dewan direksi?
4. Apakah kinerja keuangan dipengaruhi oleh jumlah komite audit?
5. Apakah kinerja keuangan dipengaruhi oleh jumlah kepemilikan manajerial?
6. Apakah kinerja keuangan dipengaruhi oleh jumlah kepemilikan institusional?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui apakah kinerja keuangan dipengaruhi oleh jumlah dewan komisaris.

2. Untuk mengetahui apakah kinerja keuangan dipengaruhi oleh jumlah komisaris independen.
3. Untuk mengetahui apakah kinerja keuangan dipengaruhi oleh jumlah dewan direksi.
4. Untuk mengetahui apakah kinerja keuangan dipengaruhi oleh jumlah komite audit
5. Untuk mengetahui apakah kinerja keuangan dipengaruhi oleh jumlah kepemilikan manajerial
6. Untuk mengetahui apakah kinerja keuangan dipengaruhi oleh jumlah kepemilikan institusional

D. Manfaat Penelitian

1. Studi ini bertujuan untuk memperkaya literatur akademik terkait kinerja keuangan perusahaan serta memberikan implikasi praktis bagi berbagai pemangku kepentingan. Dengan menganalisis peran dewan direksi, dewan komisaris, komisaris independen, kepemilikan manajerial, dan kepemilikan institusional, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan teori dan praktik tata kelola perusahaan.
2. Studi ini dapat digunakan oleh masyarakat umum sebagai referensi dalam menilai kondisi keuangan dari laporan-laporan yang dikeluarkan oleh perusahaan BUMN. Penelitian ini diharapkan bisa menjadi sumber inspirasi untuk memperdalam pemahaman tentang bagaimana peran dan praktik yang diterapkan dalam perusahaan mempengaruhi kinerja keuangan mereka. Dengan demikian, masyarakat diharapkan dapat lebih memahami dan menganalisis kesehatan keuangan perusahaan serta menilai efektivitas praktik-praktik yang diterapkan di dalamnya.

1. Studi ini dapat digunakan sebagai alat bagi perusahaan BUMN untuk mengidentifikasi dan mengimplementasikan praktik tata kelola sehingga meningkatkan efisiensi operasional. Hal ini bisa mencakup pengawasan yang lebih efektif, pemisahan wewenang, serta peningkatan akuntabilitas manajemen. Studi ini juga dapat membantu perusahaan BUMN dalam mengidentifikasi dan meminimalkan risiko agensi, yaitu perselisihan antara manajemen dan pemegang saham. Melalui mekanisme pengawasan yang lebih baik, risiko pengambilan keputusan yang tidak sejalan dengan kepentingan pemilik dapat dikurangi. Sehingga dapat meningkatkan kinerja keuangan.

E. Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian

Studi ini akan berkonsentrasi pada perusahaan BUMN yang terdaftar di BEI dan telah mempublikasikan laporan tahunan serta laporan keuangan periode 2020 hingga 2023. Penelitian ini akan difokuskan pada elemen-elemen mekanisme tata kelola perusahaan, seperti dewan direksi, dewan komisaris, komisaris independen, komite audit, kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional sebagai variabel independen, serta kinerja keuangan yang akan diteliti sebagai variabel dependen.